

## **ABSTRAK**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Departemen Ilmu Komunikasi**

**Konsentrasi *Broadcasting***

**Nurul Fajri Hidayati (20140530255)**

**Implementasi Peraturan Daerah (Perda) DIY NO. 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Studi Deskriptif Kualitatif pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta)**

**Tahun Skripsi : 2018**

**Kepustakaan: 27 buku (1985-2016) + 2 jurnal + 2 skripsi + 17 daring**

Terbentuknya Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran berawal dari keprihatinan atas kualitas isi siaran dan melindungi masyarakat dari tayangan yang tidak sehat serta menjaga eksistensi bahasa Jawa ditengah masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) Daerah Istimewa Yogyakarta No 13 Tahun 2016 Pasal 16 tentang Penyelenggaraan Penyiaran pada KPID DIY terhadap Televisi Berjaringan di Yogyakarta serta apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi peraturan daerah tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar stasiun televisi berjaringan yang ada di Yogyakarta belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal untuk menyiar program siaran lokal seperti yang telah diatur dalam Perda DIY No. 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Faktor pendukung implementasi Perda Penyelenggaraan Penyiaran sebagai berikut: (a) komitmen KPID DIY, (b) dukungan Pemerintah Daerah, (c) wewenang KPID DIY, (d) adanya SOP. Adapun faktor penghambat implementasi Perda adalah sebagai berikut: (a) kurangnya sarana pemantau isi siaran, (b) kurangnya tenaga pemantau, (c) ketidakjelasan pesan, (d) kurangnya SDM lokal pada stasiun televisi berjaringan, (e) alokasi waktu.

**Kata Kunci : Implementasi Perda, Siaran Lokal, Stasiun Televisi Berjaringan**

## **ABSTRACT**

*Muhammadiyah University of Yogyakarta  
Social and Political Sciences Faculty  
Communication Studies Department  
Broadcasting Concentration  
Nurul Fajri Hidayati (20140530255)*

*Implementation of Local Regulation (Perda) DIY No. 13 Year 2016 Article 16 on  
Implementation of Broadcasting (Qualitative Descriptive Study on KPID DIY toward  
Networked Television in Yogyakarta)*

*Thesis Year : 2018*

*Literature : 27 books (1985-2016) + 2 journals + 2 thesis + 17 online sources*

*The establishment of Local Regulation of DIY No. 13 of 2016 on Broadcasting Implementation began with concerns over the quality of broadcast contents in order to protects the public from unhealthy programs and maintains the existence of Javanese in the community. The purposes of this study is to know and to describe how the implementation of the Local Regulation of Special Region of Yogyakarta No. 13 of 2016 Article 16 on the Broadcasting Implementation on KPID DIY towards Networked Television in Yogyakarta and what are the supporting factors and obstacles of the implementation of the local regulations. This study uses data collection techniques by interviews, observations, and documents. This study also uses interactive model with stages of data collection, data reduction, and data presentation in data analysis. The results of this study indicates that the majority of networked television stations in Yogyakarta have not fully fulfill the needs of local communities to broadcast local broadcasting programs as regulated in Local Regulation of DIY No. 13 of 2016 on Broadcasting Implementation. The supporting factors of the implementation of Broadcasting Implementation are follows: (a) KPID DIY commitment, (b) support of Local Government, (c) authority of KPID DIY, (d) the existence of Standard Operating Procedure (SOP). The obstacles of the implementation of the local regulations are follows: (a) lack of monitoring of broadcast content, (b) lack of monitoring personnels, (c) lack of clarity of messages, (d) lack of local human resources on television stations, (e) time allocation.*

*Key words : Implementation of Local Regulations, Local Broadcasts, Networked Television Stations.*